

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan dimulai sejak tahun 1950. Sebelumnya wilayah Korea resmi dibagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1948 setelah Korea Utara juga melakukan pemilihan umum dengan Kim Il Sung terpilih sebagai perdana menternya. Korea Utara menganut paham komunisme, sedangkan Korea Selatan lebih demokratis dan menolak paham komunis. Setelah terbagi menjadi dua, wilayah utara dibawah pengaruh Uni Soviet dan wilayah selatan dibawah pengaruh Amerika Serikat. Pemisahan wilayah semenanjung Korea ini melanggar Perjanjian Kairo pada tahun 1943, dimana Jenderal Churchill, Chang Kai Sek, dan Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan bahwa wilayah semenanjung Korea harus menjadi negara bebas dan merdeka.¹

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendamaikan Korea Utara dan Korea Selatan antara lain, pada tahun 2013 Pemerintah Swiss menawarkan mediasi dengan pihak Korea Utara, pada saat itu Korea Utara baru saja dijatuhi sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena melakukan percobaan nuklir Februari 2013 lalu, namun sampai saat ini mediasi tersebut belum ada pembicaraan lagi. PBB sendiri telah beberapa kali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas tindakan yang dilakukan negara ini yaitu percobaan senjata nuklir, namun sanksi dari PBB ini bukannya membuat Korea Utara takut, sanksi ini membuat suasana semakin memanas, Korea Utara semakin mengembangkan senjata nuklirnya.²

Pada tahun 2003 diadakan perundingan Six Party Talks yang membahas tentang stabilitas keamanan di wilayah Semenanjung

¹ Setia Ratna Dianpuri, Skripsi *Prospek Indonesia Sebagai Mediator Bagi Terwujudnya Perdamaian Antara Korea Utara Dan Korea Selatan*, dalam <http://thesis.umi.ac.id/datapublik/t113233.pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 11.04 WIB.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Wangsa, R. R. 2013. William D. Coplin *Introduction to International Politic : Model of Decision Making Proses* . hal. 2.

Korea, namun perundingan ini mengalami deadlock (tidak mencapai hasil) dikarenakan pada tahun 2009 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan ini. Salah satu hal yang menyebabkan keluarnya Korea Utara dari perundingan ini karena, Korea Utara menganggap Amerika Serikat (AS) terlalu mendominasi dalam pembicaraan ini.³

Pada tahun 2018 terjadi upaya perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan, ditandai dengan pertemuan kedua pemimpin negara di zona demiliterisasi. Dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan yaitu kunjungan resmi Presiden Korea Selatan ke Korea Utara untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Sampai akhirnya tercapai kesepakatan/Deklarasi Panmunjeom.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Korea Utara memutuskan untuk mengambil kebijakan luar negeri perdamaian dengan Korea Selatan pada tahun 2018?

C. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses dimana ada tuntutan dari *domestic politics*, dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

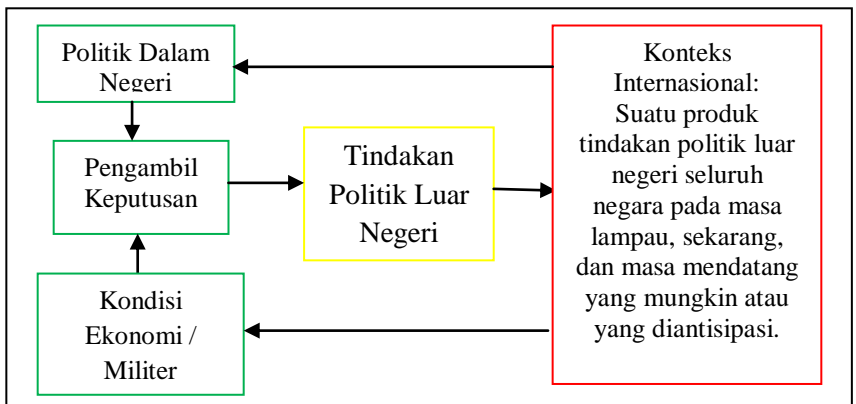
“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa adanya pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, luar negeri

³ *Ibid.*

tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang memengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri”.

Sebagaimana kutipan diatas, William D. Coplin menjelaskan tentang tiga Konsiderasi yaitu:⁴

- a. Kondisi politik dalam negeri suatu negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.
- b. Situasi ekonomi dan militer suatu negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi



Gambar 1. 1 Skema Teori Kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin⁵

Sumber: William D. Coplin dan Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, (edisi kedua, tahun 2003).

⁴ Wangsa, R. R. 2013. William D. Coplin *Introduction to International Politic : Model of Decision Making Proce* . hal. 2.

⁵ Coplin, W. D., & Marbun, M. (1992). Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (2nd Edition ed.). Bandung: Sinar Baru.

Berikut 3 (tiga) pertimbangan kebijakan perdamaian Korea Utara terhadap Korea Selatan:

a. Konteks Politik Dalam Negeri Korea Utara: Ketakutan Terhadap Ancaman Militer AS Dan Korea Selatan

Democratic People's Republic of Korea atau lebih dikenal dengan Korea Utara menganut *One Party System* atau sistem satu partai politik yakni *Korean Worker's Party* (KWP) yang berdiri sejak 30 Juni 1949. Sistem tersebut sudah berlaku sejak era kepemimpinan Kim Il Sung yang merupakan kakek dari Kim Jong Un yang menjabat sebagai pemimpin utama Korea Utara saat ini. Sistem pemerintahan yang berlaku di Korea Utara dikenal dengan *rezim dictator totalitarian*, dimana menempatkan satu pemimpin tunggal sebagai seorang pemimpin tertinggi atau dikenal dengan sebutan *Supreme Leader*.⁶

Korea Utara selama ini dikenal terus gencar membangun kekuatan militer sebagai kekuatan utama untuk pertahanan. Selain itu, Korea Utara juga terkenal dengan negara yang sangat tertutup terhadap dunia internasional, hal ini terkait dengan ideologi yang dipakai yaitu ideologi *Juche*. Ideologi *Juche* sendiri secara konseptual berarti otonom dan independen (*Self-Reliance*). Ideologi ini dikemukakan Kim Il Sung di depan umum pada Desember 1955, Kim Il Sung mengatakan dalam pidato itu sebagai berikut:

*"We are not engaged in any other country's revolution, but solely in the Korean revolution. This, the Korean revolution, determines the essence of juche in the ideological work of our Party."*⁷

⁶ Artikel dalam *The Death Penalty in North Korea: "In the Machinery of a Totalitarian Country"*, FIDH (International Federation of Human Right), Diakses pada tanggal 26 Maret 2019, Puku 22.52 WIB.

⁷ Charles K. Armstrong. "*Juche and North Korea's Global Aspirations*". *North Korea International Documentation Project* (NKIDP). Washington, DC. Hal. 3

Dalam hubungannya dengan Korea Selatan, Korea Utara sudah lama mengalami konflik sejak perang saudara. Seperti yang di jelaskan pada bagian sebelumnya, Amerika Serikat dengan tegas menunjukkan keberpihakannya pada Korea Selatan diantaranya ditunjukkan dengan adanya aliansi militer beserta pangkalan militer amerika serikat di korea selatan. Terlebih lagi pangkalan tersebut adalah pangkalan militer AS terbesar di dunia.

Dalam sebuah forum *Wilson Center* di Washington "Kim Jong Un takut bahwa AS akan melancarkan serangan pencegahan, dan ia sedang berusaha untuk mengulur waktu untuk menyelesaikan program nuklir dan misilnya," kata Ri Jong Ho, lapor kantor berita Yonhap. Ri, yang bekerja selama tiga dekade di kantor Korea Utara yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana untuk Kim, berbicara di forum Wilson Center di Washington."⁸

Korea utara selama ini mampu untuk menyeimbangi kekuatan aliansi oposisi ini dengan kekuatan nuklirnya. Akan tetapi kegagalan uji coba nuklir korea utara memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kekuatan militer korea utara. Tak lama setelah kegagalan uji coba nuklir ini, amerika serikat menegaskan kembali aliansinya dengan korea selatan. Melihat kekuatan militer korea utara yang sedang lemah, pasukan militer oposisi terlihat sebagai sebuah ancaman yang serius, yang membuat kondisi dalam negeri korea utara menjadi kacau balau dan ketakutan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu

⁸ Artikel oleh Lockie, A. (2018, Februari 15). Kim Jong Un is reportedly reaching out to South Korea because he's scared Trump will strike. Diambil kembali dari BUSINESS INSIDER SINGAPORE: <https://www.businessinsider.sg/kim-jong-un-reportedly-wants-talks-scared-of-us-strike-2018-2/?r=US&IR=T> Diakses pada tanggal 26 Maret 2019, Pukul 22.32 WIB.

pertimbangan korea utara untuk mengambil kebijakan luar negeri yang fenomenal ini

b. Melemahnya Kekuatan Militer Korea Utara: Kegagalan Uji Coba Nuklir

Korea Utara sebagai negara yang sedang melakukan uji coba nuklir Punggye-ri merasa khawatir tentang perkembangan kondisi nuklir mereka. Hal ini didasari adanya peningkatan suhu panas radioaktif didaerah fasilitas uji coba nuklir Punggye-ri, dan ternyata fasilitas nuklir Punggye-ri telah rusak karena uji coba nuklir Korut yang gagal pada musim gugur yang lalu dan dikhawatirkan bencana Chernobyl akan terulang di Korut. Rusaknya fasilitas Punggye-ri menyebabkan kebocoran pengayaan uranium yang bisa berakibat radiasi mematikan dari nuklir tersebut. Rasio ledakan tes uji coba bom nuklir Korut pun sangat besar. Ledakan itu mencapai 100 kiloton dan Korut sudah 6 kali mengujinya, hingga malah merusak fasilitas Punggye-ri. Mengingat sejarah uji coba nuklir Korea Utara yang dilakukan di bawah gunung ini, uji coba nuklir yang sama akan menghasilkan kerusakan dalam skala lebih besar yang menciptakan bencana lingkungan berupa radiasi nuklir.

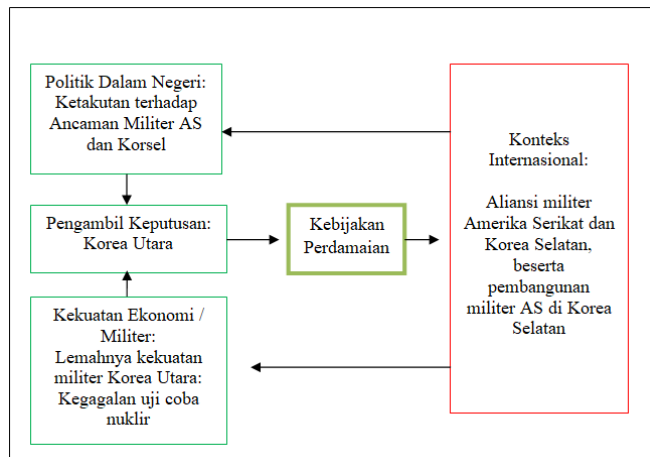
Bisa dikatakan Korut mulai ketakutan karena bom nuklir yang harusnya menjadi 'tameng' negara malah mengancam negaranya sendiri. Kekhawatiran terhadap senjata nuklir ini membuat jajaran pemimpin Korut mulai berpikir rasional untuk segera 'mengamankan' negara dengan cara perdamaian.

c. Konteks Internasional: Meningkatkan Aliansi Militer Amerika Serikat Dan Korea Selatan

Antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat melakukan aliansi yaitu aliansi pertahanan bersama yang mengatur jika salah satu negara diserang oleh pihak ketiga maka pihak lain akan bertindak, dan juga kesepakatan meliputi bantuan militer untuk kebijakan salah satu negara sebagai contoh Korea Selatan turut membantu Amerika Serikat dalam kampanye perangnya

di Vietnam dan Irak. Sejak saat itu Amerika Serikat adalah negara pelindung utama bagi Korea Selatan dan juga Korea Selatan sebagai basis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.⁹

Aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan keamanan di Semenanjung Korea. Kerentanan Korea Selatan terhadap serangan dari Korea Utara, dan kepentingan strategisnya sebagai benteng melawan penyebaran agresi komunis pada awal perang dingin, merajut kebutuhan keamanan Amerika dan Korea Selatan bersama-sama. Aliansi tersebut memberikan jaminan keamanan kepada Korea Selatan yang lemah sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat untuk pembelaannya.¹⁰



Gambar 1. 2 Skema Aplikasi Teori Kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin Terhadap Kasus Korea Utara.

⁹ Artikel dalam [http://news.findlaw.com /cnn/ docs/ korea/kwarmagr072753.html](http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html) diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 21.35 WIB.

¹⁰ Scott Synder, 2009. *Center for U.S. -Korea Policy, The Asia Foundation. Strengthening the U.S. -ROK Alliance*. Hal. 3.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William Coplin, terdapat tiga pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan/kebijakan luar negeri. Hipotesis dalam kasus ini, tiga faktor yang dipertimbangkan oleh Korea Utara dalam mengambil kebijakan luar negeri untuk berdamai dengan Korea Selatan adalah karena, antara lain:

1. Pertimbangan kondisi politik dalam negeri: ketakutan Korea Utara terhadap ancaman kekuatan militer aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan, akibat melemahnya kekuatan militer negara.
2. Pertimbangan kondisi kekuatan militer: kekuatan militer Korea Utara sedang melemah akibat insiden kegagalan uji coba nuklir.
3. Pertimbangan konteks internasional: adanya ancaman militer dari dunia internasional, yaitu aliansi militer Amerika Serikat dengan Korea Selatan, beserta pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Korea Selatan

E. Lingkup Penelitian

Dalam memudahkan penelitian sangat diperlukan batasan penulisan agar dalam menulis penelitian dapat terhindar dari pembahasan yang terlalu melebar luas dari topik yang diteliti. Penelitian ini akan penulis batasi yaitu sejak berlakunya kebijakan tersebut pada era pemerintahan Kim Jong Un yakni pada tahun 2018, ditandai dengan diadakannya pertemuan antara Pemimpin Korea Utara dengan Presiden Korea Selatan di zona demiliterisasi.

F. Metodologi

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada kondisi yang sifatnya realitas yang dibentuk secara sosial, hubungan yang dekat antara peneliti dengan yang subyek yang diteliti dan adanya kendala situasional yang membuat dilakukannya penyelidikan.¹¹

¹¹ Salim, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*.

Tujuan dari penelitian kualitatif tidak selalu mencari hubungan sebab akibat, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami situasi dan kondisi tertentu dengan cara mencoba menerobos dan mendalami gejala-gejala yang terjadi serta menginterpretasikannya dan menyimpulkannya.

Secara spesifik dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi secara utuh dan sistematis. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel yang satu dengan yang lain.¹²

Pengumpulan data yang dibutuhkan bagi penelitian ini dilakukan dengan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*)¹³. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan hasil-hasil penelitian orang lain dan berbentuk tulisan yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, media cetak, dan media lainnya, serta laporan dari berbagai sumber yang relevan bagi penelitian ini. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini kemudian diakumulasikan dan dikomparasi sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data-data tersebut. Serta data-data sekunder yang menjadi dokumen didalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaan umum, situs internet, maupun koleksi pribadi

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan memahami alasan Korea Utara memutuskan untuk mengambil kebijakan luar negeri perdamaian terhadap Korea Selatan pada tahun 2018, serta kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Korea Utara dengan kebijakan luar negerinya tersebut.

¹² Sugiyono, 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

¹³ Effendi, Masri Singarimbun & Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. 1985. Jakarta. LP3S

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam dari apa yang diuraikan dalam pendahuluan, maka disajikan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab membahas hal yang berbeda-beda untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisikan tentang dinamika hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Bab III. Berisikan tentang kondisi politik dalam negeri dan kondisi kekuatan militer Korea Utara.

Bab IV. Berisikan tentang pembuktian hipotesa yaitu alasan Korea Utara menerapkan kebijakan luar negeri perdamaian terhadap Korea Selatan.

Bab V. Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan ini didasarkan pada data-data dan analisis yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.